



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NENENG SITI SILFI AMBARWATI**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **1005047**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.280.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 516 m2/300 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/6 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 285.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 37.595.286**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.337.888.629**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.940.483.915

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.940.483.915

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.